KEMENTERIAN HUKUM **SEKRETARIAT JENDERAL** **BIRO KEUANGAN**	**NOMOR SOP**	:	**SEK-OT.02.02-101**
	TGL. PEMBUATAN	:	**24 JUNI 2025**
	TGL. REVISI	:	
	TGL. EFEKTIF	:	**1 OKTOBER 2025**
	DISAHKAN OLEH	:	**SEKRETARIS JENDERAL**  **NICO AFINTA**
	NAMA SOP	:	**SOSIALISASI KEBIJAKAN REVISI ANGGARAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN**

DASAR HUKUM	**KUALIFIKASI PELAKSANA**
1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Peraturan Presiden Nomor 155 Tahun 2024 tentang Kementerian Hukum; 4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, Serta Akuntasi dan Pelaporan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan; 5. Peraturan Menteri Hukum RI Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum.	1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer; 2. Memiliki kemampuan menganalisa data; 3. Mengetahui tugas dan fungsi organisasi.
KETERKAITAN	**PERALATAN / PERLENGKAPAN**
	1. Komputer dan Printer 2. Jaringan Internet 3. Dokumen
PERINGATAN	**PENCATATAN DAN PENDATAAN**
Apabila SOP ini tidak disusun dengan baik maka akan menghambat kegiatan Sosiaisasi Kebijakan PMK	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
SOSIALISASI KEBIJAKAN REVISI ANGGARAN SESUAI PERATURAN MENTERI KEUANGAN

No	Aktivitas / Kegiatan	PELAKSANA					MUTU BAKU			Keterangan
		Sekretaris	Kepala Biro	Kepala Bagian	Tim Kerja	Unit Eselon I/	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Kepala Biro Keuangan menugaskan Kepala Bagian untuk mempelajari/ menelaah Kebijakan Revisi Anggaran dari Kementerian Keuangan		Mulai				Dokumen	10 menit	Dokumen	Penyampain Surat Edaran Kepada Unit Eselon I dan Kantor Wilayah sebagai awal Informasi, kemudian Sosialisasi Atas PMK terbaru sebagai tindak lanjut secara intens atas pemahaman kebijakan-kebijakan PMK Tentang Tata Cara Revisi Anggaran terbaru
2	Kepala Bagian Pelaksanaan Anggaran dan TU Bersama Tim Kerja Bagian PA dan JFU PA menganalisa Kebijakan Revisi Anggaran dari Kementerian Keuangan						Dokumen	2 hari	Laporan	
3	Tim Kerja Bagian PA dan TU menyampaikan dokumen perubahan dari Kebijakan Revisi Anggaran dari Kementerian Keuangan Kepada Kepala Biro Keuangan dan membuat konsep Surat Edaran						Dokumen	1 hari	Dokumen	
4	Kepala Biro Keuangan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal konsep surat edaran/sosialisasi terkait Kebijakan Revisi Anggaran dari Kementerian Keuangan	T					Dokumen	1 hari	Laporan	
5	Sekretaris Jenderal memeriksa dan menandatangani Surat Edaran terkait Perubahan Kebijakan Revisi Anggaran dari Kementerian Keuangan untuk disosialisasikan	Y					Dokumen	1 hari	Surat Edaran terkait Perubahan Kebijakan Revisi Anggaran	
6	Tim Kerja Bagian PA dan TU mensosialisasikan Perubahan Kebijakan Revisi Anggaran dari Kementerian Keuangan kepada seluruh satuan kerja					Selesai	Surat Edaran terkait Perubahan Kebijakan Revisi Anggaran	1 hari	Kebijakan Tersosialisasi	

